



EDISI RABU 29 JULI 2026

H A R I A N

LENTERA

Inspirasi Perubahan

TODAY

02

GOVERNMENTTODAY
Ramai-ramai Klarifikasi 'Londo Ireng'

04

NUSANTARA
KPK Tahan Anggota DPRD Jatim
Suap Rp1,5 M dan Emas 1 Kg untuk Amankan Dana Hibah

10

LISTSTYLE
Bukan Sekadar Cantik, Warna Lipstik Bisa
Bentuk Kesan Cerdas

Riset Koperasi Merah Putih RAGU DI AKAR RUMPUT

Respon "Ya"

Nov'25 (telp)
51.5%

26 Feb - 5 Mar '26
54.5%

5 - 19 Jul '26
54.5%

Respon "Tidak"

Nov'25 (telp)
48.5%

26 Feb - 5 Mar '26
45.5%

5 - 19 Jul '26
23.1%

Sumber : Survei Nasional
5 - 19 Juli 2026

TINGKAT
KENAL
PROGRAM
KDMP

Misteri kematian Sutrimo (42) menjadi babak baru yang menyita perhatian di tengah proses hukum yang menjerat mantan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus (Jampidsus), Febrie Adriansyah. Pria asal Banyumas, Jawa Tengah, yang diduga merupakan kepala rumah tangga Febrie itu ditemukan meninggal dunia pada Kamis (23/7/2026). Tiga hari berselang, penyidik Polda Metro Jaya masih mengusut penyebab kematiannya dengan memeriksa sejumlah saksi, menelusuri rekam medis, riwayat pemesanan ambulans, hingga melakukan olah tempat kejadian perkara (TKP) di Klinik Mordent, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan. Kematian Sutrimo memunculkan pertanyaan apakah peristiwa ini berkaitan dengan pusaran perkara dugaan korupsi dan tindak pidana pencucian uang (TPPU) yang kini menyeret Febrie Adriansyah. Namun, hingga

kini polisi belum menemukan dasar untuk mengaitkan keduanya. Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Budi Hermanto menegaskan penyelidikan masih berlangsung dan seluruh informasi, termasuk dugaan hubungan korban dengan mantan Jampidsus, masih didalami. Febrie secara resmi telah ditetapkan sebagai tersangka tindak pidana pencucian uang (TPPU) oleh Kejagung dan saat ini ditahan di rutan KPK. Diketahui kasusnya menjadi sorotan setelah polisi menemukan emas seberat 74 kilogram dan uang tunai senilai ratusan miliar rupiah di kediamannya di kawasan Sentul, Jawa Barat. BACA HAL 11...

Seberapa
Yakin
KDMP Akan
Berkembang
atau Maju?

Sangat yakin

2.4%

Cukup yakin

22.6%

Kurang yakin

38.9%

Tidak yakin sama sekali

22.2%

TT/TJ (Tidak Tahu/Tidak Jawab)

13.9%



RAMAI-RAMAI KLARIFIKASI 'LONDO IRENG'

Polemik istilah 'Londo Ireng' yang disampaikan Presiden Prabowo Subianto terus menjadi perhatian publik. Pemerintah memberikan penjelasan terkait makna istilah tersebut, menyusul kritik yang muncul karena pernyataan itu dikaitkan dengan wartawan, pengamat, hingga organisasi masyarakat sipil. Temuan tersebut menunjukkan perubahan signifikan dalam persepsi publik terhadap pemerintahan Prabowo. Meski mayoritas responden masih memberikan penilaian positif, jarak antara kelompok yang puas dan tidak puas kini semakin tipis.

Menteri Hak Asasi Manusia (HAM) Natalius Pigai menjadi salah satu pejabat yang memberikan klarifikasi. Ia menegaskan istilah "Londo Ireng" tidak ditujukan kepada profesi wartawan maupun kelompok tertentu.

Pigai menyebut muncul kesalahpahaman dalam pemberitaan yang mengaitkan istilah tersebut dengan jurnalis. Menurutnya, makna yang dimaksud Presiden Prabowo adalah orang-orang yang dianggap membantu kepentingan asing dan bertentangan dengan kepentingan bangsa.

"Mana ada wartawan. Itu bukan wartawan," ujar Pigai saat ditemui usai menghadiri Pembukaan Sinergitas Lintas Sektor Kementerian HAM bersama pemerintah daerah, masyarakat, komunitas, dan pelaku usaha di Hotel The Papandayan, Kota Bandung, Selasa (28/7).

Menurut Pigai, istilah "Londo Ireng" memiliki latar belakang sejarah pada masa kolonial Belanda. Istilah tersebut merujuk pada pribumi yang dianggap membantu penjajah atau bekerja untuk kepentingan kolonial.



Aksi unjuk rasa jurnalis di sekitaran Alun-alun Tugu Malang, Senin (27/7/2026)

"Londo Ireng itu maksudnya orang yang membantu orang asing untuk mengkhianati negaranya," katanya.

Ia menjelaskan, pihak yang dimaksud tidak melekat pada profesi tertentu. Menurutnya, siapa pun dari berbagai latar belakang dapat masuk dalam kategori tersebut apabila tindakannya dianggap merugikan kepentingan nasional.

"Bisa saja satu wartawan, bisa pegawai negeri sipil, bisa menteri, bisa siapa saja," ujar Pigai.

Pigai juga menegaskan hubungan Presiden Prabowo dengan insan pers tetap berjalan baik. Ia bahkan menyampaikan pesan Presiden kepada para jurnalis agar tidak terjadi kesalahpahaman atas pernyataan tersebut.

"Pak Prabowo bilang, 'I love you, wartawan'. Itu benar, tolong sampaikan," kata Pigai.

Menurutnya, pemerintah tetap menempatkan wartawan sebagai mitra penting dalam demokrasi, khususnya dalam menyampaikan informasi kepada masyarakat.

Sementara itu, Kepala Badan Komunikasi Pemerintah (Bakom) RI Muhammad Qodari meminta publik tidak hanya berfokus pada istilah 'Londo Ireng', tetapi melihat keseluruhan substansi pidato Presiden.

Qodari mengatakan rangkaian pidato Prabowo menunjukkan keberpihakan pemerintah terhadap kepentingan rakyat.

"Kalau mengenai pernyataan Presiden, pidato Presiden mari kita lihat rangkaian pidato Presiden. Semuanya itu untuk membela kepentingan rakyat," kata Qodari di Surabaya, Selasa (28/7).

Ia menyebut sejumlah isu utama yang disampaikan Presiden, mulai dari peningkatan kesejahteraan petani dan nelayan, ketahanan pangan, swasembada beras, hingga ketahanan energi.

Qodari juga menyinggung berbagai program dan capaian pemerintah yang menurutnya menjadi bagian penting dari pidato Prabowo, seperti pengembangan Blok Masela, penghentian praktik ekonomi yang merugikan negara, hingga upaya meningkatkan penerimaan nasional.

"Jadi insyaallah kita kalau fokus kepada substansi, itulah poin-poin yang sesungguhnya dari pidato Bapak Presiden," ujarnya.

Saat ditanya mengenai desakan sejumlah organisasi profesi jurnalis agar Presiden meminta maaf terkait penggunaan istilah tersebut, Qodari tidak memberikan jawaban spesifik. Ia kembali meminta agar publik melihat substansi pidato secara keseluruhan. "Kita lihat pada substansinya teman-teman," katanya. (wid,ist,rla/dya)

Gelombang Aksi Jurnalis Desak Prabowo Minta Maaf

Gelombang aksi penolakan terhadap istilah "Londo Ireng" yang disampaikan Presiden Prabowo Subianto terus meluas. Para jurnalis bersama organisasi pers di berbagai daerah turun ke jalan pada 27 dan 28 Juli 2026, menuntut pemerintah menghentikan segala bentuk pelabelan terhadap insan pers.

Di Malang Raya, puluhan jurnalis dari berbagai organisasi pers menggelar aksi pada 27 Juli 2026. Massa melakukan aksi teatrikal berjalan mundur di Bundaran Tugu Kota Malang.

Aksi berjalan mundur menjadi simbol bahwa pers menolak dikaitkan dengan istilah yang dianggap merendahkan perjuangan jurnalistik. Para peserta juga membawa poster tokoh nasional berlatar belakang pers, seperti W.R. Supratman, untuk menegaskan bahwa sejarah

pers Indonesia ikut berperan dalam perjuangan kemerdekaan.

"Pers hadir untuk mengawal demokrasi, menyampaikan fakta, dan menjadi pengingat bagi kekuasaan ketika ada kebijakan yang perlu dikritisi," menjadi pesan utama dalam aksi tersebut.

Di Solo, ratusan wartawan dan anggota Lembaga Pers Mahasiswa (LPM) menggelar aksi damai di depan Monumen Pers Nasional pada 28 Juli 2026.

Massa membawa sejumlah poster penolakan terhadap istilah "Londo Ireng" dan menyerukan agar pemerintah menghormati kerja jurnalistik. "Ketika pemerintah dikritik, itu bukan berarti pemerintah dimusuhi. Kritik adalah mekanisme demokrasi agar kekuasaan tetap berjalan dalam koridor kepentingan rakyat," disampaikan dalam orasi massa.

Sementara di Blitar Raya, para jurnalis melakukan aksi dengan membentangkan kartu pers. Simbol tersebut menjadi bentuk penegasan identitas wartawan sekaligus penolakan terhadap stigma terhadap profesi mereka.

Aksi serupa berlangsung di Makassar. Wartawan dan kelompok masyarakat sipil menggelar aksi di Fly Over Jalan Urip Sumoharjo dengan membawa spanduk kritik bertuliskan "Makassar Bersuara. Kami Muak".

Sejumlah organisasi pers menyampaikan pernyataan sikap bersama dan mendesak Presiden Prabowo memberikan klarifikasi serta permintaan maaf secara terbuka. (wid,ist/dya)



Aksi jurnalis Blitar menolak "Londo Ireng" yang digelar PWI, IJTI dan AJI Blitar Raya, Selasa (28/7/2026).

DANANTARA MASUK KSSK, DPR SEBUT SESUAI UU

Rencana pelibatan Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (Danantara) dalam Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK) menjadi sorotan. DPR menilai langkah tersebut masih sesuai dengan mandat Undang-Undang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (UU P2SK). Pemerintah memastikan Danantara hanya memberikan masukan dan tidak memiliki kewenangan dalam pengambilan keputusan.

Wakil Ketua Komisi XI DPR RI Dolfie Othniel Frederic Palit menilai keterlibatan Danantara dalam forum KSSK masih berada dalam koridor aturan.

Menurut Dolfie, KSSK dibentuk berdasarkan amanat undang-undang untuk menjaga kepentingan dan ketahanan ekonomi nasional, sehingga forum tersebut memiliki ruang untuk melibatkan pemangku kepentingan lain yang dianggap relevan.

"KSSK, sesuai amanat UU, dibentuk dalam rangka melaksanakan kepentingan dan ketahanan negara di bidang perekonomian," ujar Dolfie, Selasa (28/7/2026).

Ia mengatakan, KSSK dapat mengundang pihak lain untuk memperkaya pembahasan terhadap isu strategis ekonomi dan keuangan.

"Sehingga dalam kerangka ikut menjaga kepentingan dan ketahanan di bidang perekonomian tersebut, maka KSSK tentu saja dapat mengundang stakeholder terkait yang diperlukan sehingga dapat memperluas dan memperkuat perspektif KSSK," kata Dolfie.

Selain itu, Dolfie menyebut undang-undang juga memberi ruang bagi KSSK membentuk kelompok kerja maupun gugus tugas untuk membantu pelaksanaan tugasnya.

"Bahkan KSSK dapat membentuk gugus tugas atau kelompok kerja untuk membantu pelaksanaan tugas KSSK," ujarnya.

Namun, ia menegaskan keterlibatan Danantara tidak mengubah struktur pengambilan keputusan dalam KSSK.

"Pengambilan keputusan tetap mengacu kepada UU KSSK, yaitu forum pengambilan keputusan KSSK, mekanisme, dan kewenangan masing-masing anggota KSSK dalam mengambil keputusan," pungkas Dolfie.

Purbaya: Tak Punya Hak Suara

Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menegaskan posisi Danantara dalam rapat KSSK hanya sebagai pihak yang diundang untuk memberikan masukan.

Ia memastikan Danantara tidak memiliki hak suara maupun kewenangan mengambil keputusan



Pejabat Gubernur Sementara Bank Indonesia (BI) Destry Damayanti (tengah) bersama Ketua Dewan Komisiner OJK Friderica Widayarsi Dewi (kiri) dan Ketua Dewan Komisiner LPS Anggito Abimanyu (kanan) berjalan usai mengikuti rapat Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK) dengan Presiden Prabowo Subianto di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin (27/7/2026). (Antara)

dalam forum yang beranggotakan Kementerian Keuangan, Bank Indonesia (BI), Otoritas Jasa Keuangan (OJK), dan Lembaga Penjamin Simpanan (LPS).

"Posisi Danantara pada rapatnya sebagai undangan. Kadang-kadang kami ingin mendengar masukan langsung dari pelaku bisnisnya yang me-manage bisnis yang besar itu. Danantara memberikan masukan yang cukup positif pada rapat," kata Purbaya dalam konferensi pers di Kantor LPS, Jakarta, Selasa (28/7/2026).

Menurut Purbaya, aturan memungkinkan KSSK mengundang pihak lain di luar anggota tetap untuk memberikan pandangan dalam pembahasan tertentu.

"Di undang-undangnya boleh diikuti oleh lembaga dan pihak lain yang diundang. Jadi KSSK boleh mengundang pihak lain di luar KSSK. Tapi dalam keputusan Danantara tidak akan punya hak suara," ujarnya.

Ia menjelaskan, Danantara dapat mengikuti pembahasan selama materi yang dibicarakan bersifat umum. Namun, apabila terdapat agenda yang berkaitan langsung dengan kepentingan bisnis yang berpotensi menimbulkan konflik kepentingan, Danantara tidak akan dilibatkan.

"Tapi kalau yang umum-umum, sekarang masih umum, ya dia bisa ikut mendengarkan dan putusannya kita ambil," tutur Purbaya.

Purbaya juga menepis kekhawatiran bahwa kehadiran Danantara sebagai pengelola investasi dapat memengaruhi keputusan KSSK.

"Danantara tidak bisa mempengaruhi kita... Tapi ketika dia memberi masukan boleh. Jadi memperkaya informasi ketika Kepala KSSK BI, OJK, LPS, Keuangan mengambil keputusan," ucapnya.

Rosan: Dampak Lebih Luas

Sebelumnya, CEO Danantara Indonesia Rosan Roeslani mengatakan pelibatan Danantara dalam rapat KSSK merupakan hasil keputusan rapat terbatas bersama Presiden Prabowo Subianto pada Senin (27/7/2026).

Menurut Rosan, keterlibatan Danantara diharapkan dapat memperluas dampak kebijakan stabilitas sistem keuangan terhadap dunia usaha dan perekonomian nasional.

Rosan menyebut perspektif dari pengelola investasi dan perusahaan berskala besar dapat menjadi tambahan informasi bagi regulator dalam mengambil kebijakan.

Meski demikian, Rosan menegaskan Danantara tidak memiliki kewenangan memberikan masukan terkait pemilihan Gubernur Bank Indonesia yang baru karena keputusan tersebut merupakan hak prerogatif Presiden.

Dalam rapat terbatas KSSK tersebut hadir Menteri Keuangan

RAPAT PERDANA KSSK PLUS DANANTARA

✓ Perkuat Koordinasi

Sinkronisasi antar lembaga untuk menjaga stabilitas ekonomi.

✓ Selaraskan Kebijakan

Koordinasi lintas sektor diperkuat agar kebijakan lebih efektif.

✓ Dorong Pertumbuhan

Sinergi kebijakan untuk mendukung pertumbuhan ekonomi.

PERAN DANANTARA DI KSSK

- Hadir sebagai undangan.
- Tidak memiliki hak suara.
- Tidak ikut mengambil keputusan.
- Memberikan masukan dari sisi investasi dan dunia usaha.



Purbaya Yudhi Sadewa, Plt Gubernur BI Destry Damayanti, Ketua Dewan Komisiner OJK Friderica Widayarsi Dewi, serta CEO Danantara Rosan Roeslani.

Ekonom Khawatir

Keterlibatan Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (Danantara) dalam Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK) dinilai berpotensi menimbulkan tumpang tindih peran hingga konflik kepentingan.

Ekonom Center of Reform on Economics (CORE) Indonesia Yusuf Rendy Manilet mengatakan, KSSK pada dasarnya merupakan forum regulator yang bertugas menjaga stabilitas sistem keuangan. Sementara itu, Danantara memiliki peran sebagai pengelola investasi yang juga memiliki kepentingan bisnis.

Menurutnya, perbedaan fungsi tersebut perlu menjadi perhatian apabila Danantara dilibatkan dalam forum yang membahas informasi sensitif terkait kondisi sistem keuangan.

"Masalah utamanya adalah pencampuran peran. KSSK pada dasarnya merupakan forum regulator yang bertugas menjaga stabilitas sistem keuangan, sedangkan Danantara adalah pengelola investasi yang memiliki kepentingan bisnis," ujar Yusuf, Selasa (28/7/2026).

Yusuf menilai, ketika pelaku investasi ikut berada dalam forum KSSK, potensi konflik kepentingan menjadi sulit dihindari. (wid ist,rls kum/dya)

KPK Tahan Anggota DPRD Jatim

SUAP RP1,5 M DAN EMAS 1 KG UNTUK AMANKAN DANA HIBAH

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kembali membuka lapisan baru dalam perkara dugaan korupsi dana hibah Kelompok Masyarakat (Pokmas) yang bersumber dari APBD Provinsi Jawa Timur. Kali ini, lembaga antirasuah menahan anggota DPRD Jawa Timur periode 2024–2029, Mochamad Mahrus Ali, yang diduga menjadi salah satu pemberi suap dalam skema pengaturan alokasi dana hibah.



Jika pada penanganan sebelumnya KPK mengungkap praktik pemberian uang miliaran rupiah, penahanan Mahrus memperlihatkan bentuk gratifikasi yang jauh lebih beragam. Tidak hanya uang tunai, penyidik menduga suap juga diberikan dalam bentuk emas batangan, pelunasan rumah, hingga pembiayaan pendirian usaha.

Juru Bicara KPK Budi Prasetyo mengatakan Mahrus ditahan selama 20 hari pertama, terhitung sejak 28 Juli hingga 16 Agustus 2026, di Rumah Tahanan Cabang Gedung Merah Putih KPK.

"Tersangka MM merupakan pengelola dana hibah Pokmas untuk wilayah Kabupaten Probolinggo, yang kemudian diduga sebagai pihak pemberi suap kepada tersangka AS dalam pengurusan dana hibah tersebut," kata Budi dalam keterangannya, Selasa (28/7/2026).

Menurut KPK, Mahrus diduga memberikan uang tunai sebesar Rp1,5 miliar kepada mantan Wakil Ketua DPRD Jawa Timur Anwar Sadat melalui staf kepercayaannya, Bagus Wahyudiono. Namun pemberian itu tidak berhenti pada uang.

Penyidik juga menduga Mahrus menyerahkan emas dengan berat sekitar 1 kilogram, melunasi pembelian satu unit rumah di Surabaya, serta membiayai pendirian usaha Stasiun Pengisian dan Pengangkutan Bulk Elpiji (SPBE) milik Anwar Sadat melalui Bagus Wahyudiono.

Seluruh fasilitas tersebut diduga diberikan sebagai imbalan agar Mahrus memperoleh alokasi dana hibah Pokmas senilai Rp83,4 miliar.

"Saudara MM diduga memberikan uang sejumlah Rp1,5 miliar, emas dengan berat sekitar 1 kilogram, membayarkan pelunasan satu unit rumah di Surabaya, dan membayarkan pendirian usaha SPBE kepada AS melalui BGS untuk mendapatkan alokasi dana hibah Pokmas sebesar Rp83,4 miliar," ujar Budi.

Temuan tersebut menunjukkan bahwa dugaan suap dalam perkara hibah Pokmas tidak lagi sebatas transaksi uang tunai. Penyidik menduga pemberian dilakukan dalam berbagai bentuk aset dan fasilitas yang secara ekonomi bernilai tinggi, sehingga memperluas gambaran mengenai bagaimana relasi antara pemberi dan penerima suap dibangun.

Dugaan Komitmen Fee Berlapis

Perkara yang menjerat Mahrus merupakan bagian dari klaster kedua dalam pengembangan kasus dana hibah Pokmas Jawa Timur.

Sebelumnya, KPK telah mengungkap dugaan bahwa Anwar Sadat memperoleh jatah pengelolaan dana hibah hingga sekitar Rp291,5 miliar selama periode 2019–2022. Dari kuota tersebut, para koordinator lapangan atau pihak yang menghendaki pergeseran alokasi hibah diduga diwajibkan menyerahkan komitmen fee sebesar 15 hingga 20 persen agar usulan mereka disetujui.

Dalam praktiknya, pembayaran komitmen fee disebut tidak selalu dilakukan secara langsung kepada penerima utama. Sebagian diduga disalurkan melalui staf kepercayaan, sementara sebagian lain diwujudkan dalam pembayaran kebutuhan pribadi

maupun aset.

Skema itu kemudian berlanjut setelah dana hibah berhasil dicairkan. Berdasarkan hasil penyidikan KPK yang sebelumnya dipaparkan kepada publik, dana yang telah turun ke kelompok masyarakat kembali dipotong oleh para koordinator lapangan sekitar 20 hingga 30 persen. Akibatnya, dana yang benar-benar digunakan untuk kegiatan masyarakat diperkirakan hanya tersisa sekitar 55 hingga 70 persen dari nilai anggaran semula.

Penahanan Mahrus memperpanjang daftar tersangka pada klaster Anwar Sadat.

Pekan lalu, KPK lebih dahulu menahan tiga tersangka pemberi, yakni Achmad Yahya dari Kabupaten Pasuruan, M. Fathullah dari Kabupaten Pasuruan, serta Ra. Wahid Ruslan dari Kabupaten Bangkalan.

Ketiganya diduga menyerahkan total Rp6,9 miliar kepada Anwar Sadat untuk memperoleh alokasi dana hibah di daerah masing-masing.

Rinciannya, Achmad Yahya diduga memberikan Rp1,87 miliar agar memperoleh hibah Rp14,8 miliar. Ra. Wahid Ruslan diduga menyerahkan Rp1,42 miliar demi mendapatkan alokasi Rp28,9 miliar. Sementara M. Fathullah diduga memberikan Rp3,61 miliar untuk memperoleh dana hibah Rp24 miliar.

Jika dibandingkan dengan perkara tersebut, dugaan suap yang melibatkan Mahrus memiliki karakter berbeda karena tidak hanya mencakup uang tunai, tetapi juga aset bernilai tinggi berupa emas, rumah, hingga pembiayaan usaha.



**KLASTER 1
SUAP KUSNADI**
(Eks Ketua DPRD Jatim)

Penerima (1):

- Kusrini – Eks Ketua DPRD Jatim 2019–2024. (Penyidikan gugur karena wafat akhir 2025).

Pemberi (5):

- Hasanuddin – Anggota DPRD Jatim 2024–2029. (Ditahan KPK).
- Jodi Pradana Putra – Swasta Blitar. (Ditahan).
- Sukar – Mantan Kades Tulungagung. (Ditahan).
- Wawan Kristiawan – Swasta Tulungagung. (Ditahan).
- A. Royan – Swasta Tulungagung. (Belum ditahan, sakit).



**KLASTER 2 –
SUAP ANWAR SADAT**
(Eks Wakil Ketua DPRD Jatim)

Penerima (2):

- Anwar Sadat – Anggota DPR RI, eks Wakil Ketua DPRD Jatim.
- Wahyudiono – Staf ahli/orang kepercayaan.

Pemberi (10):

- Moch Mahrus (Ali) – Anggota DPRD Jatim. (Ditahan 28 Juli 2026).
- Achmad Yahya – Swasta Pasuruan. (Ditahan).
- M. Fathullah – Swasta Pasuruan. (Ditahan).
- Ra Wahid Ruslan – Swasta Bangkalan. (Ditahan).
- Mahhud – Eks Anggota DPRD Jatim.
- Fauzan Adima – Eks Wakil Ketua DPRD Sampang.
- Jon Junaidi – Eks Wakil Ketua DPRD Probolinggo.
- Ahmad Heriyadi – Swasta Sampang.
- Ahmad Affandy – Swasta Sampang.
- Abdul Motolib – Swasta Sampang.



**KLASTER 3 – SUAP
ACHMAD ISKANDAR**
(Eks Wakil Ketua DPRD Jatim)

Penerima (1):

- Achmad Iskandar – Eks Wakil Ketua DPRD Jatim.

Pemberi (2):

- Ahmad Jailani – Swasta
- Sumenep.Mashudi – Swasta Bangkalan.

Kasus dana hibah Pokmas Jawa Timur merupakan pengembangan dari operasi tangkap tangan KPK pada akhir 2022 yang semula menjerat mantan Wakil Ketua DPRD Jawa Timur Sahat Tua Simanjuntak. Dalam pengembangannya, penyidik memetakan perkara menjadi tiga klaster dengan total 21 tersangka yang terdiri atas pimpinan DPRD, anggota DPRD, pihak swasta, kepala desa, hingga perantara. (pra,ist,kum/dya)

KPK BUKA PELUANG PERIKSA PERRY USAI MUNDUR DARI BI

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) membuka peluang memeriksa mantan Gubernur Bank Indonesia (BI) Perry Warjiyo sebagai saksi dalam penyidikan kasus dugaan korupsi penyaluran dana Corporate Social Responsibility (CSR) Bank Indonesia (BI) dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Pernyataan tersebut disampaikan sehari setelah pemerintah mengumumkan Perry mengundurkan diri dari jabatannya dengan alasan pribadi.

Meski demikian, KPK menegaskan bahwa pengunduran diri Perry bukan menjadi alasan otomatis bagi penyidik untuk memanggilnya. Pemeriksaan hanya akan dilakukan apabila keterangannya memang dibutuhkan dalam proses pembuktian perkara yang hingga kini masih terus bergulir.

Juru Bicara KPK Budi Prasetyo mengatakan, pemanggilan seorang saksi selalu didasarkan pada kebutuhan penyidikan untuk memperoleh informasi yang dapat membantu mengungkap tindak pidana.

"Pemanggilan terhadap saksi tentunya berdasarkan kebutuhan penyidik, untuk mendapatkan keterangan dari apa yang diketahuinya, yang pada prinsipnya adalah untuk membantu mengungkap perkara," kata Budi Prasetyo kepada wartawan, Selasa (28/7/2026).

Budi menepis anggapan bahwa status Perry yang telah mengakhiri masa jabatannya otomatis membuatnya akan segera diperiksa penyidik. Menurut dia, tidak ada perlakuan khusus terhadap seseorang yang sudah tidak lagi menjabat.

"Tidak serta-merta karena seseorang purna dari jabatannya kemudian dipanggil untuk dimintai keterangan. Yang pasti, mari sama-sama ikuti perkembangannya, karena penyidikannya masih terus bergulir," ujarnya.

Ia menegaskan, KPK berkomitmen mengusut perkara tersebut hingga tuntas. Tidak hanya mengungkap dugaan tindak pidana, tetapi juga menelusuri akar persoalan dalam tata kelola penyaluran dana CSR agar dapat menjadi dasar perbaikan sistem ke depan.

"KPK tentunya akan mengungkap seterang-terangnya perkara ini, termasuk perbuatan para pihak terkait, karena hal ini juga penting agar akar permasalahannya ter-capture secara utuh. Untuk kemudian menjadi basis perbaikan tata kelola yang lebih bernas pada pendekatan pencegahan nantinya," kata Budi.

Sebelum mengundurkan diri, Perry juga pernah menyampaikan sikap Bank Indonesia terhadap proses hukum yang sedang berjalan. Ia menegaskan BI menghormati proses penyidikan yang dilakukan KPK dan berkomitmen bersikap kooperatif.

Menurut Perry, dukungan tersebut diwujudkan melalui kehadiran para pejabat BI untuk memberikan keterangan kepada penyidik serta penyerahan berbagai dokumen yang diperlukan dalam proses penyidikan.

Pernyataan itu disampaikan ketika kasus tersebut mulai menjadi perhatian publik setelah penyidik KPK melakukan pengeledahan di kantor Bank Indonesia pada akhir 2024.

Kasus yang sedang diusut KPK berkaitan dengan dugaan penyimpangan dalam penyaluran dana Program Sosial Bank Indonesia (PSBI) dan program penyuluhan Otoritas Jasa Keuangan atau Program Peduli Jasa Keuangan (PJK) sepanjang periode 2020 hingga 2023. Penyidikan bermula dari laporan hasil analisis Pusat

Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) serta pengaduan masyarakat yang kemudian ditindaklanjuti KPK dengan menaikkan perkara ke tahap penyidikan pada Desember 2024.

Dalam proses penyidikan, KPK mengeledah sejumlah lokasi yang diduga berkaitan dengan perkara tersebut. Pengeledahan dilakukan di Gedung Bank Indonesia di Jalan M.H. Thamrin, Jakarta Pusat, pada 16 Desember 2024, disusul pengeledahan di Kantor Otoritas Jasa Keuangan pada 19 Desember 2024. Dari pengeledahan tersebut, penyidik menyita sejumlah dokumen dan barang bukti elektronik yang diduga berkaitan dengan perkara.

Perkembangan penyidikan



Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa memberikan keterangan pers di Jakarta, Selasa (28/7/2026).ist

Purbaya Sebut Pencalonannya 'Isu Abadi'

BURSA calon Gubernur Bank Indonesia (BI) mulai menghangat setelah Perry Warjiyo mengundurkan diri dari jabatannya. Sejumlah nama bermunculan sebagai kandidat pengganti, mulai dari Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa, Deputy Gubernur Senior BI Destry Damayanti, hingga mantan Gubernur BI Burhanuddin Abdullah.

Namun, Purbaya menanggapi santai kabar yang menyebut dirinya masuk dalam bursa calon Gubernur BI. Menurut dia, isu mengenai dirinya akan mengisi berbagai jabatan strategis di pemerintahan sudah lama beredar dan

hampir selalu berakhir tanpa menjadi kenyataan.

"Itu mah kalau saya isu abadi. Isu masuk ke sana-sini, tapi aslinya enggak pernah jadi," ujar Purbaya usai rapat berkala Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK) di Kantor Lembaga Penjamin Simpanan (LPS), Jakarta, Selasa (28/7).

Purbaya mengaku belum mengetahui siapa saja nama yang tengah dipertimbangkan Presiden Prabowo Subianto untuk memimpin bank sentral. Ia menegaskan proses penentuan calon Gubernur BI sepenuhnya merupakan

berlanjut pada 7 Agustus 2025 ketika KPK menetapkan dua anggota Komisi XI DPR RI periode 2019–2024, yakni Satori dan Heri Gunawan, sebagai tersangka. Keduanya saat ini masih berstatus anggota DPR RI periode 2024–2029. Hingga kini, KPK belum mengumumkan adanya tersangka baru dalam perkara tersebut.

Di tengah proses penyidikan yang masih berjalan, Masyarakat Antikorupsi Indonesia (MAKI) turut menyoroti belum ditahannya kedua tersangka tersebut meski penetapan tersangka telah berlangsung hampir satu tahun.

Koordinator MAKI Boyamin Saiman meminta KPK menunjukkan komitmennya dengan segera melakukan penahanan terhadap Satori dan Heri Gunawan.

"Kami tunggu aksi KPK menahan Satori dan Heri Gunawan," kata Boyamin.

Menurut Boyamin, belum adanya penahanan membuat publik belum memperoleh kepastian hukum dalam penanganan perkara tersebut.

"Tersangkanya belum ditahan sampai sekarang. Jadinya, tidak ada kepastian hukum," ujarnya.

Sampai saat ini, KPK menegaskan penyidikan kasus dugaan korupsi dana CSR BI-OJK masih terus berlangsung. Penyidik masih membuka kemungkinan memanggil pihak-pihak lain yang dinilai mengetahui konstruksi perkara, termasuk Perry Warjiyo apabila keterangannya dibutuhkan. Namun, hingga Selasa (28/7), Perry belum berstatus tersangka dan KPK juga belum mengumumkan jadwal pemeriksaannya. (tin,ant,kum,ist/dya)

kewenangan Presiden sesuai ketentuan perundang-undangan.

"Kita ikuti perintah Bapak Presiden," katanya singkat.

Meski namanya santer disebut, Purbaya justru memberikan penilaian positif terhadap Destry Damayanti yang kini menjabat sebagai Gubernur BI sementara. Menurutnya, Destry memiliki pengalaman panjang di bidang kebijakan moneter sehingga dinilai mampu menjaga kesinambungan kebijakan Bank Indonesia selama masa transisi.

"Knowledge-nya amat baik dan amat mumpuni untuk memastikan kebijakan moneter sejalan dengan apa yang seharusnya," ujar Purbaya.

Ia menambahkan, keberadaan Destry di pucuk pimpinan sementara BI menjadi modal penting agar koordinasi kebijakan moneter dan stabilitas sistem keuangan tetap terjaga di tengah proses pencarian gubernur definitif.

Purbaya juga memastikan pemerintah bersama KSSK telah mengantisipasi potensi gejolak pasar yang muncul setelah pengunduran diri Perry Warjiyo. Menurutnya, yang paling penting saat ini adalah menjaga komunikasi dengan pelaku pasar agar kepercayaan investor tetap terpelihara. (wid,rls/dya)

Kabupaten Malang Siaga Kekeringan dan Karhutla hingga Akhir September

Arsip-BPBD Kabupaten Malang mendistribusikan air di wilayah terdampak bencana kekeringan. (foto: Pusdalops BPBD Kab. Malang)



MALANG - Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Malang resmi memberlakukan siaga darurat bencana kekeringan dan kebakaran hutan serta lahan (karhutla) selama musim kemarau 2026. Status tersebut berlaku selama 108 hari, mulai 15 Juni hingga 30 September 2026.

Kepala Bidang Kedaruratan dan Logistik BPBD Kabupaten Malang, Sadono Irawan, mengatakan penetapan

status siaga darurat dilakukan berdasarkan sejumlah indikator dan rekomendasi dari instansi terkait.

"Status siaga darurat bencana kekeringan dan kebakaran hutan serta lahan kami berlakukan mulai 15 Juni sampai 30 September 2026 atau selama 108 hari," ujarnya, dikonfirmasi melalui pesan singkat, Selasa (28/7/2026).

Menurut Sadono, penetapan status tersebut mengacu pada informasi dan pedoman dari Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG), Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), serta Pemerintah Provinsi Jawa Timur.

Selain menetapkan status siaga, BPBD juga telah memetakan wilayah yang berpotensi mengalami kekeringan. Berdasarkan data BPBD Kabupaten Malang, terdapat 37 dusun yang tersebar di 20 desa pada delapan kecamatan yang masuk kategori rawan

terdampak kekeringan.

Wilayah tersebut meliputi 10 dusun di tiga desa di Kecamatan Sumbermanjing Wetan, tiga dusun di dua desa di Kecamatan Pagak, tiga dusun di tiga desa di Kecamatan Gedangan, 12 dusun di tiga desa di Kecamatan Kalipare, serta tiga dusun di satu desa di Kecamatan Bantur.

Sementara itu, potensi kebakaran hutan dan lahan diperkirakan mengancam kawasan pegunungan di Kabupaten Malang selama musim kemarau. Kawasan yang menjadi perhatian di antaranya Gunung Kawi, Gunung Arjuno, hingga kawasan Taman Nasional Bromo Tengger Semeru (TNBTS).

Sadono menjelaskan, status siaga darurat tersebut menjadi dasar koordinasi lintas sektor dalam upaya mitigasi dan penanggulangan dampak musim kemarau.

"Dengan sudah adanya status siaga ini, kemudian ada pemetaan, harapannya penanggulangan seluruh dampak dari kemarau telah dikoordinasikan bersama seluruh pemangku kepentingan di wilayah Kabupaten Malang," katanya.

Sebagai bentuk kesiapsiagaan, BPBD telah menyiapkan sejumlah langkah antisipatif.

Di antaranya penyusunan alternatif kebijakan pemenuhan kebutuhan air bersih bagi masyarakat melalui sumur bor dan pengaturan distribusi air, penyelenggaraan simulasi rencana kontinjensi, penyusunan rencana operasi penanganan bencana, hingga penyiapan logistik dan peralatan di wilayah yang diprioritaskan rawan kekeringan maupun karhutla.

Tak hanya itu, BPBD juga mendorong penguatan upaya pencegahan kebakaran hutan dan lahan melalui peningkatan penegakan hukum terhadap pelaku pembakaran hutan maupun lahan, pengaktifan posko karhutla, serta pengembangan sistem komunikasi dan informasi di kawasan-kawasan yang dinilai rawan terjadi kebakaran.

"Kamiberharap dampak musim kemarau tahun ini dapat diminimalkan, baik terhadap ketersediaan air bersih bagi masyarakat maupun potensi meluasnya kebakaran hutan dan lahan di wilayah Kabupaten Malang," kata Sadono. (Santi/Dya)

Ada 186 Kasus HIV di Kota Malang, Didominasi Lelaki Seks dengan Lelaki

MALANG- Dinas Kesehatan (Dinkes) Kota Malang mencatat 186 orang terdeteksi Human Immunodeficiency Virus (HIV) hingga Mei 2026. Dari jumlah tersebut, lebih dari 50 persen berasal dari kelompok populasi kunci Lelaki Seks dengan Lelaki (LSL).

"Dari hasil pemeriksaan terhadap 10.873 orang yang mengakses layanan deteksi HIV di berbagai fasilitas kesehatan (faskes) di Kota Malang. Per bulan Mei 2026, itu ada 186 yang terdeteksi HIV. Kalau per Maret kemarin ada 90-an kasus," ujar Kepala Dinkes Kota Malang, Husnul Muarif, Selasa (28/7/2026).

Menurutnya, Dinkes masih melakukan penelusuran untuk memastikan berapa dari 186 orang tersebut yang merupakan warga Kota Malang dan berapa yang berasal dari luar daerah. Pasalnya, seluruh data berasal dari masyarakat yang mengakses layanan kesehatan di Kota Malang.

"Nanti kami coba tracing lagi dari 186 ini berapa yang warga Kota Malang dan warga luar," katanya.

Saat ini, Dinkes Kota Malang memiliki 40 fasilitas kesehatan yang

menyediakan layanan Voluntary Counseling and Testing (VCT) atau pemeriksaan HIV. Jaringan layanan tersebut diharapkan semakin memudahkan masyarakat mengakses deteksi dini.

Berdasarkan profil kasus, Husnul menyebut sekitar 52 hingga 53 persen dari total temuan merupakan laki-laki. Dari sisi kelompok populasi, kasus paling banyak ditemukan pada Lelaki Seks dengan Lelaki (LSL). "Dari 186 ini memang dari populasi kunci LSL mendominasi. Sekitar 100 orang," ungkapnya.

Selain kelompok LSL, temuan HIV juga berasal dari sejumlah populasi lainnya. Dinkes mencatat terdapat 8 ibu hamil, 9 pelanggan pekerja seks, 8 pasangan orang dengan HIV (ODHIV), 1 anak dari ibu ODHIV, 5 wanita pekerja seks (WPS), 5 calon pengantin, serta 12 orang dari kelompok di luar populasi tersebut.

Menurut Husnul, ditemukannya 5 kasus pada calon pengantin merupakan hasil dari skrining kesehatan yang menjadi bagian dari persyaratan administrasi sebelum menikah. "Calon pengantin itu kami

harus memberikan surat keterangan sehat dan itu akan dibawa ke KUA untuk dilakukan beberapa tahapan," jelasnya.

Husnul juga menjelaskan pemeriksaan HIV pada pasien tuberkulosis (TBC) tetap dilakukan karena penyakit tersebut dapat menurunkan daya tahan tubuh sehingga menjadi salah satu kelompok yang diprioritaskan untuk skrining.

Namun demikian, Husnul menegaskan HIV tetap ditularkan melalui pertukaran cairan tubuh, termasuk hubungan seksual berisiko dan penggunaan jarum suntik secara bergantian.

Sementara itu, Husnul menyebut tidak ditemukan kasus HIV pada warga binaan dalam periode pendataan tersebut.

Untuk menekan penyebaran HIV, Dinkes Kota Malang terus memperluas edukasi dan mendorong masyarakat memanfaatkan layanan



Kepala Dinas Kesehatan Kota Malang, Husnul Muarif. (Santi/Lentera)

VCT yang tersedia di 40 fasilitas kesehatan. Petugas kesehatan juga diminta mengajak pasangan dari orang yang telah menjalani pemeriksaan agar ikut melakukan tes sehingga infeksi dapat dideteksi lebih dini.

"Teman-teman di 40 faskes kami sampaikan supaya bisa memberikan informasi kepada masyarakat yang sudah VCT untuk bisa mengajak pasangannya sehingga bisa terdeteksi juga," pungkas Husnul. (Santi/Dya)

GEMPA M7,1

LULUHLANTAKKAN JEPANG

Bangunan Roboh, Puluhan Terluka

Gempa bumi berkekuatan magnitudo (M) 7,1 mengguncang Pulau Kyushu, Jepang bagian barat daya, Selasa (28/7/2026). Guncangan menyebabkan puluhan orang terluka, belasan rumah roboh, pusat perbelanjaan AEON Mall runtuh sebagian, jalan dan jembatan rusak, serta memutus aliran listrik bagi puluhan ribu rumah.

Gempa dangkal tersebut juga sempat memicu peringatan tsunami sebelum akhirnya dicabut beberapa jam kemudian karena tidak terdeteksi adanya gelombang tsunami.

Badan Meteorologi Jepang (Japan Meteorological Agency/JMA) mencatat gempa terjadi pada pukul 16.27 waktu setempat dengan pusat gempa berada di Prefektur Kumamoto, Pulau Kyushu, pada kedalaman hanya 10 kilometer. Dangkalnya pusat gempa membuat guncangan terasa sangat kuat di wilayah terdampak.

JMA mencatat intensitas maksimum mencapai Shindo 7, tingkat tertinggi dalam skala intensitas gempa Jepang, di wilayah Kumamoto. Guncangan juga mencapai intensitas 6 di kawasan Amakusa dan Ashikita, menyebabkan kerusakan cukup luas di sejumlah kota.

Sesaat setelah gempa utama terjadi, JMA mengeluarkan peringatan tsunami untuk kawasan Teluk Ariake dan wilayah pesisir Kyushu. Otoritas langsung mengimbau masyarakat menjauhi pantai dan menuju tempat yang lebih tinggi.

Sekitar dua jam kemudian, peringatan tsunami resmi dicabut setelah pemantauan menunjukkan tidak ada aktivitas pembentukan gelombang tsunami di perairan Jepang. Meski begitu, JMA menegaskan masyarakat tetap harus waspada terhadap kemungkinan gempa susulan yang berpotensi sama kuatnya.

"Untuk sekitar satu minggu ke depan, terutama selama dua hingga tiga hari ke depan, kami ingin masyarakat waspada terhadap potensi gempa bumi dengan intensitas seismik maksimum 7," ujar seorang pejabat JMA dalam konferensi pers.



Korban Terus Bertambah

Hingga Selasa malam waktu setempat, stasiun televisi NHK melaporkan lebih dari 50 orang mengalami luka-luka akibat gempa tersebut dan telah mendapatkan perawatan di sejumlah rumah sakit.

Sekitar 10 korban di antaranya merupakan penghuni sebuah panti jompo di Kota Hikawa yang mengalami cedera akibat guncangan keras.

Perdana Menteri Jepang Sanae Takaichi mengatakan pemerintah masih melakukan pendataan terhadap

jumlah korban maupun tingkat kerusakan sehingga angka tersebut masih dapat bertambah.

"Kami masih menilai seberapa besar korban luka dan kerusakan properti, tetapi saya telah diberi tahu bahwa sudah ada beberapa korban luka," kata Takaichi.

Ia menambahkan bahwa dampak gempa tidak hanya menyebabkan korban luka, tetapi juga memicu gangguan infrastruktur di berbagai wilayah.

"Pemadaman listrik dan

kebakaran terjadi di beberapa daerah, dan jalan serta jembatan rusak dan bangunan runtuh," ujarnya.

Pemerintah Jepang segera membentuk pusat koordinasi dan operasional pelayanan darurat (crisis center) di Kantor Perdana Menteri untuk mengoordinasikan penanganan bencana.

Kerusakan paling parah dilaporkan terjadi di sekitar pusat gempa di Prefektur Kumamoto.

NHK melaporkan sedikitnya 12 rumah roboh, dengan sejumlah penghuni sempat terjebak di bawah reruntuhan sebelum proses penyelamatan dilakukan oleh tim SAR dan petugas pemadam kebakaran.

Kerusakan besar juga terjadi di AEON Mall Kumamoto di Kota Kashima. Lantai dua pusat perbelanjaan tersebut dilaporkan runtuh sekitar satu jam setelah gempa utama disertai suara ledakan yang masih diselidiki penyebabnya.

Dinas pemadam kebakaran menyebut sejumlah orang sempat terjebak di dalam bangunan.

"Di Kota Kashima, lantai dua sebuah kompleks perbelanjaan runtuh sehingga menyebabkan banyak orang terjebak di dalamnya," demikian pernyataan dinas pemadam kebakaran.

Polisi mengungkapkan sekitar 200 orang berlindung di area parkir pusat perbelanjaan ketika terdengar suara ledakan. Hingga kini penyebab ledakan masih dalam penyelidikan.

Media Jepang TBS bahkan melaporkan adanya korban jiwa di lokasi tersebut, meski hingga Selasa malam belum ada konfirmasi resmi dari pemerintah mengenai laporan tersebut. (gus,ist,sky/dya)



Tak Picu Tsunami di RI, Belum Ada Kabar Korban WNI

BADAN Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) memastikan gempa tersebut tidak berpotensi menimbulkan tsunami yang berdampak ke Indonesia.

Direktur Gempabumi dan Tsunami BMKG, Wijayanto, menjelaskan gempa terjadi pada pukul 14.27 WIB. Berdasarkan hasil analisis BMKG, parameter terbaru menunjukkan gempa memiliki magnitudo 6,8 dengan kedalaman 22 kilometer. Sementara otoritas Jepang melalui Japan Meteorological Agency

(JMA) mencatat kekuatan gempa sebesar magnitudo 7,1.

Episentrum gempa berada pada koordinat 32,59 derajat Lintang Utara dan 130,68 derajat Bujur Timur, atau sekitar 6 kilometer barat daya Kota Uki, Prefektur Kumamoto, Jepang.

"Dengan memperhatikan lokasi episenter dan kedalaman hiposenternya, gempa bumi yang terjadi merupakan jenis gempa dangkal akibat aktivitas sesar aktif," kata Wijayanto dalam keterangan resmi, Selasa (28/7/2026).

BMKG menjelaskan hasil analisis mekanisme sumber menunjukkan gempa memiliki mekanisme

pergerakan geser (strike slip), yang merupakan jenis patahan aktif yang umum terjadi di daratan Jepang.

Berdasarkan hasil pemodelan tsunami yang dilakukan BMKG, gempa tersebut tidak berpotensi memicu tsunami yang berdampak ke wilayah Indonesia.

Kepastian itu sekaligus menenangkan kekhawatiran masyarakat Indonesia setelah otoritas Jepang sempat mengeluarkan peringatan tsunami untuk sejumlah wilayah pesisir Pulau Kyushu tidak lama setelah gempa terjadi. (gus,rls/dya)



Leher Terlihat Lebih Gelap? Jangan Langsung Salahkan Daki

Area leher yang tampak lebih gelap dibandingkan wajah sering menjadi sumber rasa tidak percaya diri. Kondisi yang kerap disebut black neck ini memang bisa dipicu oleh penumpukan sel kulit mati, paparan sinar matahari, hingga kebiasaan yang membuat area leher luput dari rutinitas perawatan.

Namun, para ahli mengingatkan bahwa pada sebagian orang, penggelapan kulit leher juga dapat menjadi tanda adanya kondisi kesehatan tertentu.

Melansir Healthline, kulit leher yang menggelap umumnya disebabkan oleh penumpukan kotoran dan sel kulit mati, paparan sinar ultraviolet (UV), atau kondisi medis seperti resistensi insulin dan obesitas.

Salah satu kondisi yang perlu diwaspadai adalah acanthosis nigricans, yaitu perubahan warna kulit menjadi lebih gelap disertai tekstur yang menebal dan terasa seperti beludru. Kondisi ini sering dikaitkan dengan resistensi insulin atau gangguan metabolik.

Prof. Nada Elbuluk, MD, MSc, FAAD, Profesor Dermatologi di Keck School of Medicine, University of Southern California (USC), menegaskan bahwa penanganan gangguan pigmentasi harus diawali dengan diagnosis yang tepat.

Menurutnya, dokter perlu mengidentifikasi penyebab, kedalaman pigmen, serta faktor pemicunya sebelum menentukan terapi yang sesuai.

Ia juga menekankan bahwa perlindungan terhadap sinar matahari (photoprotection) merupakan bagian penting dalam penanganan berbagai

gangguan pigmentasi kulit. Meski demikian, tidak semua leher yang menggelap merupakan tanda penyakit. Jika penyebabnya adalah hiperpigmentasi akibat paparan sinar matahari atau penumpukan sel kulit mati, perawatan kulit yang tepat dapat membantu mengembalikan warna kulit agar lebih merata.

Rutin Eksfoliasi dengan Lembut

Kulit leher juga mengalami regenerasi sel seperti kulit wajah. Sayangnya, area ini sering terlewat saat membersihkan wajah sehingga sel kulit mati dapat menumpuk.

Untuk membantu mengangkat penumpukan tersebut, lakukan eksfoliasi secara lembut sekitar dua hingga tiga kali dalam seminggu menggunakan produk yang mengandung Alpha Hydroxy Acid (AHA) seperti glycolic acid atau lactic acid.

Kandungan tersebut bekerja meluruhkan sel kulit mati tanpa harus menggosok kulit terlalu keras sehingga risiko iritasi dapat diminimalkan.

Skincare dengan Kandungan Pencerah

Leher membutuhkan perawatan yang sama seperti wajah. Setelah dibersihkan, aplikasikan serum atau krim malam yang mengandung bahan aktif pencerah untuk membantu menghambat pembentukan melanin sekaligus meratakan warna kulit.

Beberapa kandungan yang banyak direkomendasikan dermatolog antara lain Niacinamide, Vitamin C dan Alpha Arbutin.

Prof. Nada Elbuluk menjelaskan bahwa terapi pigmentasi harus disesuaikan dengan kondisi masing-

masing pasien. Menurutnya, bahan aktif seperti niacinamide dan vitamin C dapat menjadi terapi pendamping, sementara penggunaan produk harus disesuaikan dengan penyebab hiperpigmentasi serta toleransi kulit setiap individu.

Sunscreen di Area Leher

Hingga saat ini, masih banyak orang yang hanya berfokus mengoleskan tabir surya pada area wajah dan kerap kali mengabaikan bagian leher.

Padahal, leher merupakan salah satu area tubuh yang terus-menerus terpapar sinar matahari secara langsung ketika kita beraktivitas di luar ruangan, sehingga memiliki risiko kerusakan kulit yang sama besarnya.

Prof. Nada Elbuluk menekankan bahwa penggunaan tabir surya merupakan langkah kunci dan elemen utama dalam penanganan gangguan pigmentasi kulit.

Tingkat kepentingannya setara dengan penggunaan obat medis maupun berbagai produk perawatan kulit yang diresepkan oleh dokter.

Hal ini sejalan dengan konsensus global mengenai tata laksana gangguan hiperpigmentasi pada tahun 2026, yang menegaskan bahwa fotoproteksi adalah komponen wajib yang tidak boleh dilewatkan dalam setiap proses penanganan hiperpigmentasi. Oleh karena itu,

tabir surya yang ideal sebaiknya memberikan perlindungan menyeluruh dari sinar UVA, UVB, hingga cahaya tampak (visible light), serta dioleskan secara konsisten setiap hari.

Perawatan dari Dalam

Perawatan kulit tidak hanya bergantung pada produk skincare. Pola makan seimbang, menjaga berat badan ideal, cukup tidur, serta mengendalikan kadar gula darah juga berperan dalam menjaga kesehatan kulit.

Pada sebagian orang, terutama yang mengalami resistensi insulin atau obesitas, perubahan warna kulit di area leher dapat membaik ketika kondisi metaboliknya ikut ditangani.

Kapan Harus ke Dokter?

Apabila warna kulit di area leher tidak kunjung membaik setelah beberapa minggu menjalani perawatan atau justru menunjukkan perubahan signifikan seperti semakin menggelap, teksturnya menebal dan terasa seperti beludru.

Prof. Nada Elbuluk mengingatkan bahwa setiap bentuk gangguan pigmentasi memiliki akar penyebab yang berbeda-beda.

Oleh sebab itu, evaluasi medis secara komprehensif sangat diperlukan guna memastikan diagnosis yang tepat serta menentukan langkah terapi yang paling efektif. Diagnosis yang akurat dan terarah merupakan fondasi paling mendasar agar penanganan serta pengobatan yang diberikan dapat membuahkan hasil yang optimal.

Selain itu, berkonsultasi langsung dengan ahli juga sangat penting untuk mengesampingkan indikasi kondisi medis sistemik tertentu, seperti resistensi insulin atau gangguan metabolik yang sering kali ditandai dengan perubahan tekstur dan warna kulit di area lipatan. (far,ist/dya)

Studi Fosil Terbaru Bantah Teori Lama **Evolusi Manusia**



Sebuah penelitian terbaru yang diterbitkan dalam jurnal ilmiah *Nature Communications* menggugat salah satu pandangan paling populer tentang evolusi manusia. Selama puluhan tahun, evolusi genus *Homo* kerap digambarkan sebagai proses linier menuju manusia yang semakin "maju", ditandai dengan otak yang terus membesar, wajah yang semakin kecil, serta kemampuan teknologi yang terus berkembang.

Namun, hasil analisis terbaru menunjukkan perjalanan evolusi manusia jauh lebih kompleks.

Perubahan bentuk tengkorak dan wajah ternyata tidak selalu didorong oleh seleksi alam yang mengarah pada satu tujuan tertentu, melainkan banyak dipengaruhi proses evolusi netral, berbagai keterbatasan biologis, serta periode stagnasi yang berlangsung sangat lama.

Penelitian tersebut dipimpin Mark Hubbe dari University of Tennessee-Knoxville bersama Katerina Harvati dari Senckenberg Centre for Human Evolution and Palaeoenvironment, University of Tübingen, Jerman.

Menurut Harvati, memang terdapat kecenderungan bahwa

berbagai spesies *Homo* memiliki otak yang semakin besar dan wajah yang semakin kecil dibandingkan nenek moyangnya. Namun pola tersebut tidak sederhana yang selama ini dipahami.

Dengan sedikit pengecualian, evolusi berbagai spesies *Homo* ditandai dengan bertambahnya ukuran otak serta berkurangnya ukuran dan kekuatan wajah dan rahang," jelas Harvati.

Analisis 87 Fosil

Untuk menguji teori evolusi yang telah lama diterima, tim peneliti

mengumpulkan data pengukuran tiga dimensi dari 87 fosil tengkorak yang mewakili hampir seluruh sejarah evolusi genus *Homo*.

Fosil yang dianalisis mencakup berbagai spesies, mulai dari *Homo habilis*, *Homo rudolfensis*, *Homo erectus*, *Homo heidelbergensis*, *Neanderthal*.

Selanjutnya, seluruh data dibandingkan dengan enam model evolusi berbeda menggunakan analisis statistik untuk mengetahui model mana yang paling mampu menjelaskan perubahan bentuk kepala dan wajah manusia selama lebih dari dua juta tahun terakhir.

"Kami membandingkan kumpulan data luar biasa ini dengan enam model evolusi berbeda melalui analisis statistik untuk menilai model mana yang paling akurat menjelaskan perubahan yang teramati pada morfologi kepala dan wajah dalam genus *Homo*," kata Harvati.

Hasil penelitian menunjukkan dukungan terhadap teori bahwa seleksi alam secara terus-menerus mendorong manusia menuju otak yang lebih besar dan wajah yang lebih kecil ternyata sangat terbatas. Sebaliknya, model yang memasukkan unsur proses evolusi netral, kendala evolusi, serta periode stasis (stagnasi) yang panjang justru memberikan penjelasan yang lebih sesuai dengan bukti fosil.

"Meski analisis kami mengonfirmasi tren evolusi yang sudah dikenal luas, yaitu pertumbuhan tengkorak dan pengecilan wajah, hasil ini menunjukkan bahwa perbedaan dalam genus kami justru lebih efektif dijelaskan oleh proses evolusi netral dan periode stasis evolusi yang panjang," ujar Hubbe. (far,ist/dya)



HARIAN
LENTERA
Inspirasi Perubahan **TODAY**

HARIAN "LENTERA TODAY"
PIMPINAN PERUSAHAAN TARMUJI TALMACSI
OMBUDSMAN SUKARJITO (ID Sertifikasi 14319)
PENANGGUNG JAWAB ARIFIN B.H (ID Sertifikasi 13043)
PIMPINAN REDAKSI ARIFIN B.H (ID Sertifikasi 13043)
REDAKTUR PELAKSANA AGUSTINA WIDYAWATI (ID Sertifikasi 2567)
REDAKTUR LUTFIYU HANDI, ARIEF SUKAPUTRA, MUHIBUDIN KAMALI

KORAN DIGITAL LENTERA TODAY
Terbit Senin - Jumat (12 Halaman)
download edisi digital pada web
www.lenteratoday.com
VERIFIKASI FAKTUAL DEWAN PERS
803/DP-Verifikasi/K/X/2021



BIRO: SURABAYA: YOLANDA APRILLIA PRADITHA, AMANAH NUR ASIAH, JOKO PRASETYO I **SIDOARJO:** TEGUH A I **GRESIK:** ASEPTA YOGA P. (SERTIFIKASI WARTAWAN UTAMA) I **MOJOKERTO:** NUR HIDAYAH I **LAMONGAN:** L HANDI I **BLITAR:** ARIEF SUKAPUTRA I **KEDIRI:** AIS I **JOMBANG :** SUTONO I **PASURUAN-PROBOLINGGO- PONOROGO :** IMAN SANTOSO I **BONDOWOSO- SITUBONDO-LUMAJANG-JEMBER-BANYUWANGI:** PURCAHYONO JULIATMOKO I **MADIUN:** WIWIET EKO PRASETYO (SERTIFIKASI WARTAWAN MUDA) I **MALANG RAYA:** SANTI WAHYU SANIA (SERTIFIKASI WARTAWAN MUDA), ISKANDAR Z. I **TRENGGALEK:** HERLAMBAH I **MADURA RAYA:** SAHLAN KURNIAWAN I **NGAWI:** DIMAS RIDHO SURYO BASKORO I **DKI JAKARTA:** FUAD HASSAN I **LOMBOK BARAT:** MUHAYYAN I **PALANGKA RAYA:** NOVITA MASNIARI

PENASEHAT HUKUM DR. NURIYANTO A. DAIM, SH, MH I **MARKETING COMMUNICATION** JOKO PRASETYO UTOMO, ISKANDAR ZULKARNAIN I **SEKERTARIS** FITRIYANTI SUTAN, FARADITA NUR FADHILA
DESAIN GRAFIS PAULUS IVAN, FADHILA I **ALAMAT REDAKSI** JL RUNGKUT ASRI UTARA VI/26, JL TENGGILIS TENGAH 4 I **TELP** 03187854491 I **PENERBIT** PT MEDIA HEBAT INSPIRASI INDONESIA I **ALAMAT PERCETAKAN** SMILE GRAFIKA JL. RAYA KALIRUNGKUT 42 SURABAYA I **TELP IKLAN** 031-87854491 I **NIB** 91205006801134 I **HARGA IKLAN** RP 25.000 MM/KOLOM

Wartawan Lentera Today dalam setiap bertugas dilengkapi dengan tanda pengenal wartawan/kartu pers yang dikeluarkan perusahaan secara sah. Nama pemegang tanda pengenal wartawan/kartu pers Lentera Today tercantum di Box Redaksi. Siapa pun yang mengaku/mengatasnamakan Lentera Today, tanpa bisa menunjukkan surat/kartu tanda pengenal atau namanya tidak tercantum dalam Kotak Redaksi, agar ditolak/ dikonfirmasi/dilaporkan ke manajemen redaksi/perusahaan atau melalui nomor telepon yang tertera di Kotak Redaksi. Dalam melaksanakan tugas jurnalistik, setiap wartawan Lentera Today dilarang menerima dan/atau meminta apa pun dengan alasan apa pun.

Bukan Sekadar Cantik, Warna Lipstik Bisa Bentuk Kesan Cerdas

Kesan pertama sering kali terbentuk hanya dalam hitungan detik. Cara berpakaian, ekspresi wajah, kontak mata, hingga pilihan warna riasan menjadi elemen yang tanpa disadari memengaruhi bagaimana seseorang dipersepsikan.

Di tengah tren makeup yang semakin mengedepankan personal branding, warna lipstik kini tidak lagi dipandang sekadar pelengkap penampilan, tetapi juga bagian dari komunikasi nonverbal.

Berbagai studi psikologi menunjukkan bahwa warna memiliki kemampuan memengaruhi persepsi manusia terhadap karakter seseorang. Meski tidak bisa mengukur kecerdasan seseorang secara nyata, pilihan warna tertentu dapat membentuk impresi bahwa seseorang terlihat lebih percaya diri, profesional, berwibawa, atau elegan, atribut yang sering kali diasosiasikan dengan sosok cerdas. Fenomena ini semakin

banyak dibahas dalam dunia psikologi warna (color psychology), pemasaran, hingga industri kecantikan. Penelitian dari University of Rochester bahkan menemukan bahwa warna tertentu, terutama merah, mampu memengaruhi persepsi sosial seseorang terhadap status, dominasi, dan daya tarik.

Sementara penelitian lain yang dipublikasikan dalam Journal of Experimental Social Psychology menunjukkan bahwa manusia cenderung membentuk penilaian terhadap orang lain hanya dalam beberapa detik berdasarkan tampilan visual.

Namun para ahli mengingatkan, persepsi tersebut berbeda dengan kecerdasan yang sesungguhnya.

Psikolog warna dan penulis The Secret Language of Color, Joann Eckstut, menjelaskan bahwa warna bekerja sebagai bahasa visual yang mampu memunculkan asosiasi emosional karena dipengaruhi pengalaman budaya dan lingkungan. Hal senada disampaikan Karen Haller, pakar color psychology asal Inggris dan penulis The Little Book of Colour. Menurutnya, warna dapat mempengaruhi suasana hati, rasa percaya diri, serta cara

seseorang berinteraksi

dengan lingkungan. Namun, tidak ada warna yang secara ilmiah membuat seseorang menjadi lebih pintar. Yang berubah adalah persepsi orang lain terhadap individu tersebut.

Lantas, warna apa saja yang selama ini paling sering diasosiasikan dengan citra cerdas dan profesional?

Merah Klasik: Simbol Kepemimpinan

Lipstik merah klasik menjadi salah satu warna yang paling konsisten bertahan dalam sejarah industri kecantikan. Dari era Hollywood klasik hingga ruang rapat perusahaan modern, warna ini identik dengan keberanian dan kepemimpinan.

Dalam psikologi warna, merah merupakan simbol energi, kekuatan, determinasi, dan rasa percaya diri. Karena karakter visualnya yang kuat, pemakai lipstik merah sering dipersepsikan sebagai pribadi yang tegas dan memiliki otoritas.

Penelitian yang diterbitkan Journal of Experimental Psychology juga menemukan bahwa warna merah mampu meningkatkan perhatian visual dibandingkan warna lain sehingga membuat pemakainya lebih mudah menjadi pusat perhatian.

Meski demikian, penggunaan merah sebaiknya tetap proporsional. Dipadukan dengan riasan wajah yang minimalis, lipstik merah justru memberikan kesan profesional tanpa terlihat berlebihan. Karena itu, warna ini masih menjadi pilihan favorit untuk presentasi penting, wawancara kerja, hingga pertemuan bisnis.

Nude: Elegan

Di sisi lain, lipstik nude menawarkan pendekatan yang berbeda. Warna ini tidak menarik perhatian secara agresif, tetapi justru menciptakan kesan bersih, tenang, dan matang.

Dalam dunia profesional, tampilan natural sering diasosiasikan dengan seseorang yang fokus pada komunikasi, kompetensi, dan substansi dibanding penampilan yang mencolok. Itulah sebabnya

banyak perempuan memilih warna nude saat bekerja, menghadiri seminar, presentasi akademik, maupun wawancara kerja.

Ahli citra profesional (image consultant) juga menyebut warna-warna netral membantu mengurangi distraksi visual sehingga perhatian lawan bicara lebih tertuju pada ekspresi wajah, bahasa tubuh, serta isi pembicaraan.

Namun, pemilihan nude tidak bisa dilakukan sembarangan. Makeup artist internasional menyarankan warna nude sebaiknya disesuaikan dengan undertone kulit agar wajah tidak terlihat pucat atau kusam.

Plum: Dewasa, dan Berkarakter

Bagi mereka yang ingin tampil lebih sophisticated, warna plum menjadi pilihan yang semakin populer dalam beberapa tahun terakhir.

Perpaduan merah dan ungu menghasilkan warna yang memberi kesan dewasa, misterius, sekaligus berkelas. Dalam psikologi warna, ungu sejak lama dikaitkan dengan kebijaksanaan, kreativitas, kemewahan, dan intelektualitas.

Rumus Mutlak

Meski banyak penelitian mendukung pengaruh warna terhadap persepsi sosial, para ilmuwan menegaskan bahwa psikologi warna bukan ilmu pasti.

American Psychological Association (APA) menjelaskan bahwa respons manusia terhadap warna dipengaruhi berbagai faktor, mulai dari budaya, usia, pengalaman hidup, hingga konteks sosial.

Warna yang dianggap menunjukkan kewibawaan di satu budaya belum tentu memiliki makna serupa di negara lain.

Profesor psikologi dari University of California, Berkeley, Stephen Palmer, yang banyak meneliti preferensi warna, juga menyebut bahwa manusia mengembangkan asosiasi terhadap warna berdasarkan pengalaman hidup, bukan karena warna memiliki makna universal yang mutlak. (farist/dya)



Riset Koperasi ...dari Hal 1

Saiful Mujani Research and Consulting (SMRC) merilis hasil survei terbaru dalam acara bertajuk Program Khusus Presiden: MBG dan KDMP. Salah satunya terkait dengan Program Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDMP). Survei yang digelar dalam rentang waktu 5-19 Juli 2026 itu menghasilkan, bahwa sebanyak 61,1 persen publik kurang atau tidak yakin Program KDMP akan sukses.

Sebaliknya, kelompok yang optimistis hanya berada di angka 25 persen, sementara 13,9 persen sisanya memilih tidak menjawab.

"Secara keseluruhan sekitar 61,1 persen publik merasa kurang atau tidak yakin Program KDMP akan berkembang atau maju. Yang merasa sangat atau cukup yakin jauh lebih rendah, hanya 25 persen," terang Deni.

Menariknya, pesimisme ini tidak lahir dari ketidaktahuan. Tingkat pengenalan (awareness) masyarakat terhadap KDMP terbilang tinggi, mencapai 76,9 persen. Hal ini menunjukkan sosialisasi lintas kementerian dan gempuran media berhasil membuat warga tahu keberadaan program tersebut.

Namun, pengetahuan itu gagal berubah menjadi keyakinan (trust). Dari total responden, kelompok yang menyatakan benar-benar yakin koperasi ini akan maju hanya 2,4 persen. Kesenjangan lebar antara pemahaman dan kepercayaan ini menandakan publik masih meragukan efektivitas pelaksanaannya di lapangan.

Kekhawatiran utama sebenarnya terletak pada arah trennya. Mengacu pada data perbandingan SMRC dalam sembilan bulan terakhir, grafik kepercayaan masyarakat memperlihatkan penurunan yang konsisten.

Jika November 2025 kelompok yang ragu/pesimistis berada di angka 43,5% pada Februari-Maret 2026 angka ketidakpercayaan naik menjadi 48,4%.

Sedangkan data terbaru Juli 2026, pesimisme melonjak tajam hingga 61,1%. Dalam waktu kurang dari satu tahun, ketidakpercayaan publik melonjak hampir 18 persen.

Sebaliknya, tingkat optimisme masyarakat yang sempat menyentuh 43,3 persen pada akhir 2025 melorot hingga sisa 25 persen pertengahan tahun ini.

SMRC menggelar survei ini pada 5-19 Juli 2026 terhadap 749 responden (83,8 persen via telepon dan 16,2 persen wawancara tatap muka) dengan margin of error $\pm 3,7$ persen pada tingkat kepercayaan 95 persen. Kenaikan pesimisme sebesar 12,7 persen dari periode awal tahun jelas melampaui batas signifikansi statistik, menandakan pergeseran

persepsi yang nyata di tengah masyarakat.

Deni mengaitkan tren ini dengan evaluasi publik terhadap kinerja pemerintah. Walau tidak serta-merta menunjukkan hubungan sebab-akibat langsung, persepsi terhadap program unggulan seperti KDMP terbukti berkelindan dengan cara pandang masyarakat terhadap kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto.

Partisipasi Warga yang Minim

Mengapa publik ragu? Laporan dari sejumlah organisasi masyarakat sipil memberikan gambaran mengenai situasi di lapangan.

Solidaritas Perempuan (SP) mencatat bahwa pembentukan KDMP di beberapa daerah terkesan terburu-buru dan terpusat (top-down). Pemerintah desa kerap tak memiliki ruang untuk menilai apakah model koperasi tersebut cocok dengan kebutuhan warga lokal.

"Aparat desa di lokasi pendampingan kami mengaku tidak punya banyak pilihan selain langsung membentuk KDMP karena ini instruksi nasional yang harus beres cepat," kata Staf Peneliti dan Pengembangan Solidaritas Perempuan, Finna Falah Husani, dalam jumpa pers di Jakarta, Selasa (28/7/2026).

Temuan tersebut didapat dari pemantauan di Lampung, DI Yogyakarta, Nusa Tenggara Timur, hingga Kalimantan Tengah. Akibat kejar tayang target administratif, pembentukan koperasi sering kali mengabaikan kesiapan kelembagaan.

Prinsip dasar koperasi adalah keterlibatan anggota secara sukarela dan rasa memiliki (sense of ownership). Namun, laporan SP di Kendari, Palembang, Palu, Aceh, dan Desa Kalumpang (Kalteng) justru menunjukkan pola pemilihan pengurus yang tertutup.

Banyak penunjukan pengurus dilakukan secara sepihak oleh pemerintah lokal atau berdasarkan relasi kedekatan semata. Kelompok perempuan—yang biasanya menjadi tulang punggung ekonomi mikro desa—juga dilaporkan minim dilibatkan dalam sosialisasi.

Meski temuan ini tidak serta-merta mewakili puluhan ribu desa di Indonesia, variasi tata kelola di tingkat tapak ini menjadi potret ketidaksiapan infrastruktur sosial di daerah.

Dalam beberapa bulan terakhir juga terekam ketimpangan kesiapan antarwilayah. Di Demak, masalah lahan membuat pembangunan fisik koperasi tertahan. Di Pati, ratusan koperasi dilaporkan baru sebatas plang nama tanpa roda usaha yang berjalan.

Sebaliknya, di daerah seperti Surakarta, Blora, dan Wonogiri, beberapa unit koperasi mulai

mencatat transaksi perdagangan dan pasokan barang.

Kelola Desa Wisata

Pemerintah melalui Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan berkali-kali menegaskan bahwa KDMP disiapkan untuk memotong rantai pasok agar petani mendapat harga jual yang adil dan harga bahan pokok tetap stabil. Pemerintah juga menjamin kehadiran koperasi tak akan mematikan warung warga.

Terbaru, Pemerintah mulai membuka gambaran mengenai arah pengembangan KDMP setelah fungsi dasarnya berjalan. Salah satu sektor yang dinilai memiliki peluang besar adalah pengelolaan desa wisata dan berbagai desa tematik yang selama ini berkembang di berbagai daerah.

Pemerintah, kata dia, saat ini masih memfokuskan koperasi sebagai infrastruktur ekonomi desa yang bertugas menyalurkan barang subsidi, bantuan pemerintah, sekaligus menjadi offtaker atau pembeli hasil produksi masyarakat.

Namun, apabila kelembagaan koperasi telah matang dan mampu menjalankan fungsi utamanya dengan baik, ruang usaha koperasi akan diperluas mengikuti potensi yang dimiliki masing-masing desa.

"Nanti dilihat perkembangannya. Kalau koperasinya sudah bagus, di desa itu ada potensi berbagai hal, bisa saja koperasi mengembangkan ada desa wisata, ada desa tematik, ada macam-macam. Tetapi yang paling mendasar tadi infrastruktur dan sebagai offtaker," kata Zulhas di Kantor Kemenko Pangan, Jakarta, Selasa (28/7/2026).

Di sejumlah negara, koperasi menjadi instrumen penting dalam mengembangkan pariwisata berbasis komunitas (community-based tourism). Di Jepang, misalnya, koperasi pertanian ikut mengelola agrowisata, penjualan produk lokal, hingga pengalaman tinggal di pedesaan (farm stay). Di Italia, koperasi komunitas (community cooperatives) mengelola aset desa, mulai dari penginapan, restoran, hingga layanan wisata budaya untuk menghidupkan kembali kawasan pedesaan yang mengalami penurunan populasi.

Meski demikian, Zulhas menegaskan pengembangan desa wisata belum akan dilakukan dalam waktu dekat. Pemerintah menilai fondasi kelembagaan koperasi harus terlebih dahulu diperkuat agar mampu menjalankan fungsi dasar sebagai infrastruktur ekonomi desa.

Di saat berbagai kritik bermunculan terhadap implementasi Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDMP), pemerintah justru tengah mempercepat penyusunan perangkat regulasi yang dinilai menjadi fondasi operasional program tersebut. Langkah itu ditempuh

DERETAN POLEMIK KDMP

5 Korban Jiwa

- 5 calon manajer SPPI meninggal saat mengikuti pelatihan bela negara.
- Pelatihan bercorak militer dinilai tidak relevan untuk calon pengelola koperasi.

Rp80,63 Triliun Disorot

- Dugaan kejanggalan pada 26 item pengadaan.
- 105.000 unit mobil pikap impor dari India menjadi sorotan.
- Isu pengadaan kipas angin Rp1,1 triliun (pagu sekitar Rp13,9 juta/unit).
- Anggaran promosi melalui influencer juga dipertanyakan.

Lokasi Gerai Dipersoalkan

- Gerai dilaporkan dibangun di atas jalan umum, dekat SD, hingga kawasan tambak dan hutan.
- Kritik menyebut pembangunan dilakukan demi mengejar target.

Persaingan dengan Usaha Rakyat

- 61% penyaluran pupuk bersubsidi.
- 38% sembako grosiran.
- Produk UMKM dan hasil pertanian lokal dinilai masih minim.

Tata Kelola Dikritik

- Program dinilai bersifat top-down.
- Penggunaan Dana Desa menjadi sorotan.
- YLBHI menilai pembentukan koperasi belum sepenuhnya mencerminkan prinsip koperasi yang tumbuh dari anggota.



karena pemerintah menilai pembentukan koperasi dalam skala nasional tidak cukup hanya mengandalkan badan hukum dan pembangunan fisik, tetapi juga membutuhkan tata kelola yang seragam.

Menteri Koperasi Ferry Juliantono mengatakan pemerintah sedang memfinalisasi Peraturan Presiden (Perpres) mengenai operasional KDMP. Regulasi itu akan menjadi pedoman bagi puluhan ribu koperasi yang diproyeksikan berperan sebagai infrastruktur distribusi milik negara.

Menurut Ferry, pemerintah saat ini juga tengah menyiapkan sumber daya manusia untuk mengelola koperasi. Ribuan calon manajer telah mengikuti pelatihan dan dijadwalkan mulai ditempatkan pada awal Agustus bersamaan dengan mulai beroperasinya koperasi yang telah selesai dibangun. (wid,ist,ant,rls,kum/dya)

Kasus TPPU Mantan Jampidsus Febrie **KEJAGUNG PERIKSA 7 SAKSI, 4 DIANTARANYA PENYIDIK POLISI**

Kejaksaan Agung (Kejagung) terus mendalami dugaan tindak pidana pencucian uang (TPPU) yang menjerat mantan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus (Jampidsus) Febrie Adriansyah. Dalam pemeriksaan terbaru, Tim Penyidik atau Tim 9 Kejaksaan memeriksa tujuh orang saksi, termasuk empat penyidik kepolisian yang sebelumnya menangani perkara tersebut.



Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad bersama pengacara Hotman Paris Hutapea dan Ketum PWI Akhmad Munir di Jakarta, Selasa (28/7/2026). (IG@sufmi_dasco)

Pemeriksaan terhadap para saksi dilakukan untuk memperkuat pembuktian dalam perkara TPPU yang melibatkan Febrie Adriansyah. Salah satu fokus penyidikan adalah menelusuri aset yang ditemukan dalam pengeledahan, yakni 74 kilogram emas dan uang tunai senilai ratusan miliar rupiah dari rumah Febrie.

Kapuspenkum Kejaksaan Anang Supriatna mengatakan pemeriksaan dilakukan pada Selasa (28/7/2026). Seluruh saksi yang dipanggil hadir memenuhi pemeriksaan.

"Selasa, 28 Juli 2026, Kejaksaan Agung melalui Tim Penyidik (Tim Sembilan) telah melakukan pemeriksaan terhadap tujuh orang saksi terkait sprindik perkara khusus TPPU yang melibatkan tersangka FA," kata Anang.

Tujuh saksi tersebut terdiri atas tiga orang dari pihak swasta berinisial WF, BM, dan H. Sementara empat lainnya merupakan penyidik kepolisian.

"Terdiri dari 3 orang saksi pihak swasta, yakni WF, BM, dan H, serta 4 orang saksi dari penyidik Kepolisian," ujar Anang.

Kejagung belum mengungkapkan detail materi pemeriksaan terhadap para saksi, termasuk keterangan yang diperoleh dari empat penyidik polisi.

Namun, pemeriksaan tersebut disebut sebagai bagian dari upaya memperkuat konstruksi perkara dan menelusuri rangkaian dugaan pencucian uang.

"Sampai saat ini, tim penyidik masih melakukan pendalaman yakni pemeriksaan saksi-saksi guna memperkuat pembuktian dalam perkara dimaksud dan belum ada proses atau tindakan hukum lainnya," jelas Anang.

Perkara Febrie Adriansyah sebelumnya ditangani oleh Korps Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Kortastipidkor) Polri bersama Direktorat Reserse Kriminal Khusus Polda Metro Jaya.

Penyidik kepolisian sempat melakukan pengeledahan di 13 lokasi, termasuk rumah Febrie di kawasan Sentul. Setelah proses tersebut, penanganan perkara kemudian dialihkan kepada Kejaksaan Agung.

Jaksa Agung Sanitiar Burhanuddin selanjutnya membentuk Tim 9 yang beranggotakan sembilan jaksa senior untuk menangani perkara tersebut.

Saat ini, Febrie berstatus tersangka dalam dua perkara. Pertama, dugaan korupsi dan TPPU terkait penanganan perkara PT Asabri yang ditetapkan oleh Polda Metro Jaya. Kedua, perkara TPPU berdasarkan surat perintah

penyidikan (sprindik) yang diterbitkan Kejaksaan Agung.

Komjak Dorong Transparansi

Di tengah proses penyidikan, Komisi Kejaksaan (Komjak) ikut mengawal perkembangan perkara tersebut. Komjak kembali bertemu dengan Jaksa Agung Sanitiar Burhanuddin dan Koordinator Tim 9, Jaksa Agung Muda Bidang Pengawasan Rudi Margono.

Ketua Komjak Pujiyono Suwadi mengatakan pertemuan tersebut membahas perkembangan penanganan kasus sekaligus mendorong agar Kejaksaan Agung menjalankan proses hukum secara profesional dan transparan.

"Kami membahas perkembangan kasus. Kami juga mendorong agar kejaksaan bekerja secara profesional dan transparan serta menyampaikan setiap tahap perkembangan kasus ini kepada publik," kata Pujiyono, Selasa (28/7/2026).

Sebelumnya, Komjak telah membentuk tim khusus untuk mengawal penanganan perkara Febrie setelah mantan pejabat tinggi Kejaksaan itu terseret dugaan korupsi dan TPPU.

Setelah ditetapkan sebagai tersangka, Febrie Adriansyah langsung ditahan dan dititipkan di

Rumah Tahanan KPK.

Jaksa Agung Muda Pengawasan (Jamwas) Kejagung Rudi Margono mengatakan keputusan menitipkan Febrie di Rutan KPK dilakukan dengan pertimbangan perlindungan serta menjaga akuntabilitas proses hukum.

"Saudara FA telah ditetapkan tersangka dan dilakukan penahanan 20 hari ke depan di Rutan KPK," kata Rudi di Kejagung, Jakarta.

Menurut Rudi, selama menjabat sebagai Jampidsus, Febrie menangani sejumlah perkara besar sehingga faktor keamanan menjadi salah satu pertimbangan.

"Kita memastikan yang bersangkutan pernah setidaknya terbiasa menangani kasus besar. Kami memandang perlu untuk perlindungan yang bersangkutan," ujarnya.

Juru Bicara KPK Budi Prasetyo mengatakan penitipan tahanan antarinstansi penegak hukum dapat dilakukan apabila dibutuhkan dalam proses penyidikan.

"Sebelumnya ada, memang ada. Hal demikian memang ketika ada kebutuhan dalam proses penyidikan itu terbuka kemungkinan. Termasuk KPK juga beberapa kali melakukan penitipan penahanan," kata Budi.

PWI Cabut Laporan ke Hotman

Perkara Febrie juga sebelumnya menjadi sorotan setelah kuasa hukumnya, Hotman Paris Hutapea, berseteru dengan Persatuan Wartawan Indonesia (PWI).

PWI Pusat memutuskan mencabut laporan terhadap Hotman Paris di Polda Metro Jaya setelah adanya pertemuan yang dimediasi Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad pada Selasa (28/7/2026).

Ketua Umum PWI Pusat Akhmad Munir mengatakan pertemuan tersebut dilakukan untuk menyelesaikan persoalan antara organisasi wartawan tersebut dengan Hotman Paris.

"Jadi kami tadi bertemu dengan saya selaku Ketua Umum PWI Pusat bertemu, dipertemukan, dimediasi oleh Pak Dasco untuk bertemu dengan Pak Hotman," kata Munir.

Menurut Munir, pertemuan tersebut membawa semangat persatuan dan penyelesaian masalah.

"Pak Dasco mengambil tema untuk persatuan Indonesia," ujarnya.

Munir mengatakan sebelumnya Hotman memang telah menyampaikan permintaan maaf atas pernyataannya kepada wartawan, tetapi PWI tetap melanjutkan laporan. Namun setelah mediasi tersebut, PWI memilih mengakhiri persoalan. (gus,rls,bbc/dya)